

IMPLEMENTASI PROGRAM TRANSFORMASI DIGITAL DALAM MENDORONG PEMASARAN PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BULELENG

Ni Putu Liana Stanel Andini

NPP. 29.1243

*Asdaf Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali
Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email: lianastanela@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Since covid-19 pandemic, UMKM experienced many obstacles so that the Buleleng Government continue the program from provincial government about digital transformation UMKM named “The Spirit of Sobean” by Buleleng Government. **Purpose:** The purpose of this research is to know the implementation of digital transformation program in promoting UMKM product during the covid-19 pandemic at Buleleng Regency . **Method:** This study uses descriptive qualitative method with an inductive approach. The technique of collecting data are done by interview, observation, and documentation **Result:** The findings obtained by the authors in this study are that the participation of UMKM actors in the implementation of the digital transformation program has been carried out well, although not all UMKM actors have implemented the program. Some MSME actors still do not understand the digital transformation program **Conclusion:** Implementation of the Digital Transformation Program in Encouraging the Marketing of UMKM Products in Buleleng Regency by the Department of Trade, Industry, Cooperatives and UMKMs according to the Edward III concept has undergone changes between the dimensions of implementation in it, although some indicators are still experiencing gaps that interfere with the implementation of the Digital Transformation Program. **Keywords:** Digital Transform, Marketing, UMKM

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Semenjak adanya pandemi covid-19, UMKM mengalami banyak kendala sehingga pemerintah kabupaten buleleng melanjutkan program dari pemerintah provinsi tentang umkm berbasis digital yang diberi nama “The Spirit of Sobean” oleh pemerintah kabupaten Buleleng. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program transformasi digital dalam mendorong pemasaran produk UMKM pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Buleleng. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif descriptive dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu partisipasi pelaku UMKM dalam pelaksanaan program transformasi digital sudah terlaksana dengan baik walaupun belum semua pelaku UMKM melaksanakan program tersebut. Beberapa pelaku UMKM masih belum paham mengenai program transformasi digital. **Kesimpulan:** Implementasi Program

Transformasi Digital Dalam Mendorong Pemasaran Produk UMKM Kabupaten Buleleng Oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM menurut konsep Edward III sudah mengalami perubahan antar dimensi Implementasi didalamnya, walaupun beberapa indikator masih mengalami kekosongan yang mengganggu terhadap pelaksanaan implementasi Program Transformasi Digital

Kata kunci: Transformasi Digital, Pemasaran, UMKM

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bali adalah salah satu provinsi yang terkena pengaruh besar dari pandemi covid-19 karena bali merupakan tempat wisata dengan kunjungan terbanyak apabila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Sehingga mengakibatkan banyak perusahaan agen wisata menutup usahanya dan memberhentikan para pekerjanya sehingga muncul banyak wirausaha baru. Hal tersebut dibenarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Denpasar. Akan ada hingga 200 usaha kecil dan menengah baru pada tahun 2020. Usaha kecil dan menengah baru tidak memerlukan dana operasional yang besar dan sumber daya yang relatif sedikit, produk yang dihasilkan adalah produk inti dari kebutuhan dasar masyarakat seperti makanan instan dan kebutuhan sehari-hari. Jumlah UMKM yang banyak di bali membuat pemerintah provinsi bali mengambil salah satu kebijakan yaitu umkm berbasis digital agar UMKM itu terus dapat berkembang di masa pandemi. Buleleng sebagai kabupaten terluas di provinsi Bali pasti juga merasakan dampak yang sangat besar dari pandemi ini. Sektor UMKM di Buleleng berkembang sangat baik untuk menopang perekonomian warga Buleleng. Perkembangannya terlihat dari semakin banyaknya usaha mikro, kecil dan menengah di Buleleng.

Semenjak adanya pandemi covid-19, UMKM menghadapi banyak kendala dalam perkembangannya seperti kesulitan bahan baku, penurunan penjualan, penurunan permodalan, produksi, terhambatnya distribusi dan pengurangan tenaga kerja. Menindak lanjuti permasalahan diatas pemerintah kabupaten Buleleng akan meneruskan program dari pemerintah provinsi tentang UMKM berbasis digital yang di beri nama pemerintah kabupaten Buleleng “The spirit of sobean”. Pelaku UMKM di kabupaten Buleleng sudah melakukan berbagai macam upaya strategis dalam menerapkan program UMKM berbasis digital. Namun, dalam proses penyelenggarannya terdapat suatu masalah. Jika dilihat dari manfaat penggunaan sistem digital marketing ini dalam mendorong pemasaran UMKM terbukti berhasil, karena meningkatnya jumlah laba yang di dapatkan oleh UMKM, tetapi dampak yang terjadi adanya pengurangan jumlah tenaga kerja yang signifikan di setiap usaha UMKM. Dari segi pemasaran, selain dilakukan secara offline juga dilakukan secara online. Pasca covid-19 adanya peningkatan pemasaran produk UMKM, yaitu berjumlah 8,57%. Dilihat dari hasil kajian balitbang kabupaten Buleleng, juga menemukan bahwa diantara UMKM yang bergerak di pemasaran online dan pemasaran offline memiliki dampak yang berbeda. Secara umum, penjualan secara online lebih kuat dan fleksibel dalam penjualan dan laba. Namun dengan model penjualan secara online dalam pengurangan karyawan lebih tinggi.

Hasil riset dari balitbang (2020) menemukan bahwa UMKM di kota pendidikan ini mengalami penurunan pada aspek penjualan dan laba usaha sebesar 61%. Selain itu, pelaku UMKM mengatakan dampak pandemi mempengaruhi aspek permodalan sebesar 71%. Pada aspek tenaga kerja atau karyawan mengalami penurunan sebesar 21%, dan dalam aspek kemampuan membayar angsuran bank hampir seluruh pelaku UMKM di kabupaten Buleleng mengalami penurunan

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan program transformasi digital dalam mendorong pemasaran produk UMKM pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Buleleng yaitu dapat mengakibatkan banyaknya pengurangan tenaga kerja dikarenakan pemasaran UMKM yang bisa dengan mudah dilakukan secara *online* yang mengakibatkan pengangguran semakin meningkat. selain itu UMKM juga mengalami banyak kendala pada pandemi covid-19 yaitu dalam hal bahan baku, penjualan yang menurun, kurangnya modal, dan yang lainnya.

Pemahaman pelaku UMKM akan keberadaan program transformasi digital juga belum maksimal dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng sehingga hal tersebut perlu ditingkatkan kesadaran akan pentingnya program transformasi digital diharapkan bisa terlaksana sehingga semua pelaku UMKM bisa sadar akan manfaat dan pentingnya program transformasi digital guna mensukseskan program pemulihan ekonomi Indonesia.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang berjudul “Penerapan Transformasi Digital Pada UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Denpasar” yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pemilihan transformasi digital yang tepat dalam memanfaatkan kebijakan pembatasan sosial yang diberlakukan selama masa pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah pemilihan model yang tepat memberikan dampak probabilitas yang lebih baik. Penelitian selanjutnya berjudul “Pengembangan UMKM Berbasis Transformasi Digital Dalam Rangka Pertahanan Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19” yang memiliki tujuan untuk memberikan inovasi dan motivasi kepada pelaku UMKM untuk mulai mengembangkan potensi yang telah dimiliki sehingga mampu meningkatkan taraf hidup di kemudian harinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah inovasi yang diberikan oleh peneliti mampu menghasilkan pelaku UMKM yang kreatif dan mempunyai daya saing. Penelitian selanjutnya berjudul “Strategi Pengembangan Digitalisasi UMKM” yang bertujuan untuk mengetahui strategi dalam merespon perekonomian untuk tetap bertahan di tengah persaingan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian analisis SWOT. Hasil dari penelitian tersebut yaitu analisis SWOT yang digunakan menghasilkan strategi yang dapat mencapai sasaran.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian terdahulu, dimana pada alternatif solusi yang ditawarkan pada kebijakan yang menjadi kajian penelitian penulis. Program transformasi digital UMKM menawarkan solusi permasalahan pemasaran produk UMKM di masa pandemi melalui pemberian kemudahan dan pelatihan kepada pelaku UMKM dalam memasarkan produknya agar diharapkan mampu menjadi penggerak dan juga menjaga perekonomian sektor UMKM ini bertahan di tengah masa pandemi.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program transformasi digital dalam mendorong pemasaran produk UMKM pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Buleleng.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penulis menggunakan pendapat Arikunto (2010:172) yang berpendapat bahwa untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data, penulis mengklasifikasikannya menjadi 3 tingkatan huruf p dari bahasa Inggris yaitu *person, place, dan paper*. Teknik pengambilan sampel informan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu purposive sampling dan snowball sampling. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penulis melakukan analisis data sesuai dengan tahapan yang dimulai dari reduksi data dengan cara mengumpulkan semua data-data mentah yang akan diubah menjadi sederhana agar mudah dikelola dalam penelitian, dilanjutkan dengan penyajian data yaitu data yang telah tersusun dan sistematis sehingga siap untuk disajikan, kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang merupakan inti dari jawaban atas permasalahan penelitian ini

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Program Transformasi Digital UMKM Kabupaten Buleleng

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis selama dilapangan mengenai implementasi Program Transformasi Digital UMKM Kabupaten Buleleng, jika dikaitkan dengan sebuah teori sebagaimana yang ditegaskan oleh Edward III terdapat beberapa aspek penting yang mendapat perhatian khusus untuk dibahas menurut teori Edward III yaitu : Komunikasi; Sumberdaya; Disposisi; dan Struktur Birokrat.

3.1.1 Komunikasi

Komunikasi merupakan sebuah aspek penting yang dapat menentukan keberhasilan dalam kebijakan. Oleh karenanya, komunikasi diperlukan pada sebuah Implementasi Program Transformasi Digital yakni yang dilakukan antar pejabat pemerintahan sebagai pembuat kebijakan dan juga pelaksana dalam kebijakan guna mengetahui apa dan kapan sebuah kebijakan itu harusnya dilakukan, juga komunikasi antara pejabat pemerintahan kepada pelaku UMKM, mengingat salah satu tujuan dari Program Transformasi Digital ini adalah untuk mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Buleleng. Secara lebih mendalam komunikasi dapat dianalisis berdasarkan tiga indikator yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

3.1.1.1 Transmisi

Transmisi merupakan penyaluran informasi terkait kebijakan yang diciptakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyaluran informasi mengenai Implementasi Program Transformasi Digital UMKM Dalam Mendorong Pemasaran Produk UMKM Oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemahaman para pelaku UMKM akan keberadaan program transformasi digital dari pemerintah pusat yang terimplementasi pada Kabupaten Buleleng belum mendapatkan hasil yang maksimal hingga perlu perlunya peningkatkan. Jika semua lapisan sadar terhadap manfaat dan pentingnya program ini, maka akan timbul kesadaran dan partisipasi aktif pelaku UMKM guna mensukseskannya program percepatan pemulihan ekonomi Indonesia.

Menurut Carl L. Hovland mengatakan “communication is the process to modify the behaviour of other individuals” (Lasswell 2018), Komunikasi merupakan sebuah proses mengubah perilaku orang lain. Jika ditinjau berdasarkan teori tersebut bahwa hasil indikator transmisi pada implementasi program transformasi digital telah dilakukan secara baik baik dalam penyampaian informasi kepada pelaku UMKM, hanya saja belum dilaksanakan secara menyeluruh oleh pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng.

3.1.1.2 Kejelasan

Kejelasan petunjuk pelaksana pada program transformasi digital secara tertulis dan resmi belum ada peraturan khusus dari pemerintah kabupaten Buleleng hanya saja sudah ada pada RPJMD tahun 2017-2022 yang dijadikan sebagai landasan dalam melaksanakan program. pelaksanaan program transformasi digital di kantor Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sudah berjalan sesuai dengan RPJMD tahun 2017-2022. Berdasarkan data-data yang didapatkan, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program transformasi digital telah sesuai dengan indikator kejelasan, program transformasi digital sudah dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan oleh aparaturnya Pemerintah Kabupaten Buleleng, namun belum baik terutama pada pelaku UMKM seperti yang sudah dijelaskan pada indikator sebelumnya yakni untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang program transformasi digital, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu untuk meningkatkan upaya sosialisasi, terutama sosialisasi secara langsung kepada pelaku UMKM.

3.1.1.3 Konsistensi

Penyampaian terkait suatu kebijakan kepada pelaksana harus diberikan dengan konsisten yakni menyangkut kepastian dan juga kejelasan perintah yang akan dilaksanakan oleh para implementor. Perintah-perintah yang diterima oleh pelaksana tidak boleh bertentangan satu sama lain agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antar pelaksana juga menghindari dari munculnya tindakan yang bertentangan dengan maksud dari implementasi program tersebut. Perintah dan tugas terkait implementasi program transformasi digital harus tersampaikan secara konsisten kepada pelaksana yakni para pelaku UMKM. Perintah dan tugas terkait implementasi di Kabupaten Buleleng telah diketahui dan dipahami oleh perangkat kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika.

Untuk menjaga konsistensi komunikasi dalam program transformasi digital UMKM ini telah dilakukan monitoring. Fungsi utama monitoring yakni untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana pelaksanaan. Melalui monitoring tersebut, dinas terkait dapat mengetahui kendala yang terjadi dan memberikan penjelasan ulang apabila masih ada yang kurang jelas terkait pelaksanaan program UMKM digital ini sehingga konsistensi perintah dalam pelaksanaan kebijakan dapat terjaga. Berdasarkan hasil analisis data diatas, pada dimensi komunikasi yang terjalin antar implementor kebijakan sudah berjalan baik. Sedangkan kendala terdapat pada komunikasi yang tersampaikan kepada pelaku UMKM tidak berjalan baik karena masih ditemui kurangnya pemahaman pelaku UMKM mengenai program transformasi digital pada Kabupaten Buleleng.

3.1.2 Sumber Daya

Dalam implementasi suatu kebijakan, sumber daya merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan tujuan dari suatu kebijakan, dengan adanya sumber daya maka akan mempermudah dalam pelaksanaan kebijakan dan apabila sumberdaya yang tersedia kurang memadai maka dapat menghambat implementasi kebijakan tersebut. Sumber daya yang dimaksud terdiri dari sumber daya manusia, wewenang, informasi dan fasilitas.

3.1.2.1 Staff/ Sumber Daya Manusia

Implementasi program transformasi digital di Kabupaten Buleleng mewajibkan pegawai Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai sumber daya manusia ikut turut andil mengambil bagian. Pada pelaksanaannya terbagi atas fokus kerja yang terdiri dari Kepala Dinas beserta staff PNS dan Non PNS di Kabupaten Buleleng. Terdapat 126 tenaga kerja di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari 52 orang pegawai negeri sipil dan 74 orang pegawai Non PNS yang bertugas sebagai pelaksana dalam kebijakan ini dengan keterampilan di bidang masing masing. Sejumlah 35.956 pelaku UMKM juga selaku pelaksana program transformasi digital ini, namun masih belum semua UMKM yang ada di kabupaten Buleleng yang melaksanakan program ini. Berdasarkan data-data yang dikumpulkan, peneliti menyimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam pelaksanaan program transformasi digital belum berjalan baik dimana masih terdapat kekurangan pengetahuan dari pelaku UMKM, hal ini dapat mengganggu pelaksanaan program transformasi digital, oleh karena itu kurangnya pengetahuan mengenai digitalisasi ini harus segera diperbaiki agar program transformasi digital UMKM dapat berjalan lebih baik dari yang sebelumnya

3.1.2.2 Sumber Daya Wewenang

Wewenang yang diberikan kepada pelaksana program belum ada yang tercantum pada suatu peraturan hanya saja Bupati Buleleng memberikan wewenang bagi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng untuk melaksanakan program ini, serta menjadi OPD yang bertanggungjawab mengenai pelaksanaan program tersebut, juga memerintahkan jajaran kerjanya untuk aktif dalam pelaksanaan kebijakan ini. Dalam menjalankan tugas sebagai pengawas pelaksanaan program transformasi digital tentunya memerlukan bantuan untuk mengkoordinir pelaksanaan program ini. Koordinator program ini mempunyai wewenang untuk mengkoordinir pelaksanaan kebijakan serta membantu dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan data di atas sesuai indikator wewenang dalam sumberdaya, peneliti menyimpulkan bahwa pembagian wewenang dan tugas terhadap pelaksana khususnya di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kabupaten Buleleng sudah jelas dan telah dijalankan sesuai dengan tugasnya masing-masing.

3.1.2.3 Sumber Daya Fasilitas

Fasilitas yang tersedia merupakan penunjang yang sangat penting dalam implementasi suatu program, apabila fasilitas yang tersedia kurang dari yang dibutuhkan atau mengalami kerusakan tentunya dapat membuat implementasi program menjadi tidak berjalan dengan maksimal. Fasilitas yang dibutuhkan dalam implementasi program transformasi digital berupa sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan kebijakan tersebut agar dapat menunjang kegiatan implementasi program tersebut agar dapat berjalan secara efektif. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam kegiatan implementasi program transformasi digital.

Dalam pelaksanaan program transformasi digital sudah memiliki sarana fasilitas yang memadai terutama pada sarana komunikasi guna menunjang pelaksanaan kebijakan. Sarana yang tersedia sekarang diharapkan untuk tetap dijaga fungsi dan kegunaannya agar dapat terus digunakan pada beberapa tahun kedepan. Pada indikator sumberdaya yang perlu ditingkatkan ialah fasilitas berupa Gedung untuk para pelaku UMKM dapat berkumpul dan mempromosikan produknya sesuai jenisnya untuk dapat mengakses segala hal yang berkenaan dengan pemerintahan baik itu dalam bentuk pelayanan, fasilitas, serta informasi.

3.1.2.4 Sumber Daya Informasi

Informasi terkait mekanisme pelaksanaan program transformasi digital ditingkat Kabupaten Buleleng telah dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Kabupaten tahun 2017-2022. Kemudian dari observasi yang dilakukan oleh penulis, tepatnya pada pelaksanaan kerja di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada hari Senin-Jumat tanggal 7-11 Januari 2022, penulis mengamati bahwa pelaksanaan kerja berjalan dengan cukup efektif yakni diikuti secara tepat waktu sesuai jam kerja oleh seluruh pelaksana kebijakan sampai waktu kerja selesai.

Berdasarkan data-data di atas, peneliti menilai bahwa informasi terkait pelaksanaan program transformasi digital telah memiliki kelengkapan dengan kondisi baik yang dapat dipahami oleh pelaksana kebijakan dan telah dijalankan dengan cukup baik sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Sumber daya informasi ini diharapkan dapat diperoleh secepatnya oleh masyarakat agar mampu menyesuaikan pada perubahan yang ada.

3.1.3 Disposisi

Menurut pendapat Van Metter dan Van disposisi merupakan sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Merile S. Grindle juga menjelaskan disposisi yang berupa “compliance and responsiveness yakni hal penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan berupa kepatuhan dan respon dari para pelaksana yaitu sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menggapai suatu kebijakan”. Dalam kebijakan terkait program transformasi digital UMKM di Kabupaten Buleleng, disposisi yang baik dari pelaksana kebijakan yakni pegawai pemerintah juga warga di lingkungan Kabupaten Buleleng sangat dibutuhkan. Disposisi dinilai dari sikap dan perilaku pelaksana serta insentif atau motivasi yang diberikan oleh Pemerintah, yang dapat mempengaruhi sikap pelaksana.

3.1.3.1 Sikap dan Perilaku Pelaksana

Dalam aspek sikap dan perilaku, dapat dilihat respon dan kinerja pelaksana terhadap suatu kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan Smart City yang dilihat ada respon dari pelaksana kebijakan yakni seluruh aparat pemerintah Kabupaten Buleleng khususnya di Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang membahas mengenai implementasi Program Transformasi Digital UMKM, terlihat respon dari Kepala Dinas sangat antusias terkait program ini begitupun kepala seksi. yang perlu digarisbawahi ialah program ini kiranya kedepannya dapat berjalan dengan lebih baik lagi.

3.1.3.2 Insentif

Insentif berupa reward yang diberikan oleh pemerintah kepada pegawai/staf yang melaksanakan kebijakan memang menjadi salah satu motivasi bagi pelaksana kebijakan. dalam pelaksanaan kebijakan Transformasi Digital UMKM memang tidak ada dana yang diberikan oleh pemerintah kepada para pelaku usaha UMKM sebagai pelaksana kebijakan ini, namun pemerintah tetap berupaya meningkatkan motivasi pelaksana kerja. Dalam meningkatkan pelaksanaan kebijakan Transformasi digital, pemerintah perlu meningkatkan upaya untuk memotivasi terkhususnya para pelaku UMKM yang baru memulai usahanya.

Berdasarkan data yang terdapat pada indikator sikap dan perilaku serta indikator intensif pada dimensi disposisi, dapat disimpulkan bahwa dimensi ini berjalan baik pada pelaksanaan implementasi Transformasi Digital meskipun pada indikator intensif tidak terdapat reward yang diberikan kepada

para implementor kebijakan tetapi tidak mengurangi nilai sikap dan perilaku antar implementor didalamnya.

3.1.4 Struktur Birokrasi

Menurut Van Meter Van Horn, pusat perhatian pada agen implementor meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang dapat terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan sangat terpengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkenaan pada konteks kebijakan yang dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang bersifat demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan. Dari pendapat ahli di atas, struktur birokrasi merupakan pusat perhatian dari agen pelaksana yang berpengaruh terhadap kinerja dalam implementasi kebijakan, menyangkut Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Fragmentasi/penyebaran tanggungjawab diantara beberapa instansi.

3.1.4.1 Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan indikator pengukuran implementasi kebijakan Program Transformasi Digital. Pada kebijakan transformasi digital yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng belum memiliki SOP resmi yang sesuai dalam pelaksanaannya. sebagai mana diperkuat dalam masterplan Buleleng bahwa Standar Operasional Prosedur mengenai kebijakan Program Transformasi Digital sampai pada tahun pelaksanaannya tidak memiliki Standar Operasional Prosedur atau dalam kata lain masih dalam tahap pembuatan yang tak kunjung selesai.

3.1.4.2 Fragmentasi

Tanggungjawab atas suatu kebijakan publik tidak hanya terpusat pada satu instansi melainkan tersebar pada berbagai instansi yang memerlukan koordinasi antar satu sama lain. Fragmentasi adalah penyebaran tanggungjawab atas suatu kebijakan kepada beberapa badan atau organisasi yang memerlukan koordinasi sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan dapat mencapai tujuan. Dalam implementasi Kebijakan Program Transformasi Digital, Penyebaran atau pembagian tugas ini sendiri sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi yang dilakukan baik antar pelaksana atau instansi terkait.

Hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa telah dilakukan koordinasi dengan para pelaku UMKM yang sekiranya berkaitan dengan penyuluhan serta pengetahuan terkait program transformasi digital dalam implementasi kebijakan Program Transformasi Digital di Kabupaten Buleleng. pada dimensi struktur birokrasi masih memiliki ketimpangan/ dalam kondisi tidak baik dimana bagian penting pada pelaksanaan program Transformasi Digital yaitu Standar Operasional Prosedur sampai pada akhir tahap satu pelaksanaannya juga belum selesai dari proses pembuatan meskipun dari segi koordinasi antar implementor berjalan baik.

3.2. Faktor Penghambat dalam Implementasi Program Transformasi Digital

Dalam pelaksanaan suatu program, pasti ditemukannya hambatan atau masalah yang bisa menghambat jalannya program tersebut. Adapun hambatan dari pelaksanaan Implementasi Program transformasi digital dalam mendorong pemasaran produk UMKM di masa pandemi covid-19 yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara yaitu :

- a. Pengetahuan teknologi masih rendah bagi UMKM Non Produktif
Tantangan pertama yang sering menghambat pelaku UMKM go digital adalah terbatasnya kemampuan dan pengetahuan mereka dalam memanfaatkan teknologi serta platform digital.

Pelaku UMKM umumnya belum mengetahui cara mengunduh aplikasi untuk berjualan, mengunggah informasi dan foto terkait produk mereka di situs e-commerce, serta memaksimalkan ragam fitur yang dihadirkan situs online.

- b. Minimnya modal usaha bagi pelaku UMKM di masa pandemi
Pada masa pandemi UMKM sulit untuk mendapatkan modal usaha yang cukup besar karena ekonomi nasional pun mengalami penurunan. Oleh karena itu, bagaimana cara UMKM agar bisa menjalankan program pemerintah jika modal usahanya saja belum terpenuhi.
- c. Sulitnya perizinan untuk UMKM
Pelaku UMKM mengatakan bahwa enggan mengurus izin usaha karena biaya mengurus izin lebih mahal dari nilai usahanya. Akibatnya UMKM tersebut akan kesulitan untuk mendapatkan akses kredit dari perbankan

3.3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan implementasi program transformasi digital

Ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

- a. Memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM yang tidak aktif
Pemberian pelatihan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan pengetahuan UMKM mengenai cara pemasaran produk melalui online. Pelatihan yang diberikan melalui online atau pertemuan langsung sehingga para pelaku usaha juga tidak bingung dalam menentukan platform digital yang sesuai dengan usahanya. Berikut rincian penyelenggaraan pelatihan kepada pelaku UMKM sebagai berikut : 1. Pelatihan di berikan pada tiap tahun sejak masa pandemi covid-19 di awal bulan yaitu tanggal 4-6 di tiap bulan. 2. Tiap bulan terdapat 3 UMKM yang diberikan pelatihan 3. Pelatih yang berbagi ilmu dengan para pelaku UMKM adalah pihak-pihak yang telah diajak bekerja sama oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kabupaten Buleleng adalah Dosen Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) yaitu kursus soft skill program dengan memberikan workshop digital marketing fundamental untuk UMKM 4. Respon dari kegiatan pelatihan ini adalah para pelaku UMKM yang belum produktif ikut hadir mengikuti dan antusias mengikuti selain itu juga para pelaku UMKM yang belum mengerti tentang digital marketing menjadi mengerti dan dapat diaplikasikan ke produk usahanya.
- b. Mempermudah perizinan
Pemerintah pun senantiasa membuat inovasi-inovasi untuk memudahkan UMKM berusaha selama pandemi COVID-19. Salah satu hal yang menjadi fokus Pemerintah Indonesia adalah mereformasi sistem perizinan berusaha. Pemerintah kabupaten Buleleng juga melakukan permudahan izin melalui system OSS. Sistem OSS juga membagi pengurusan perizinan berdasarkan pelaku usahanya ke dalam dua kelompok besar. Pertama adalah UMK yang dapat berupa perseorangan atau badan usaha. Kedua adalah Non UMK yang dapat berupa orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri.
- c. Pemberian referensi kepada UMKM ke Bank mengenai prosedur pemberian pinjaman
Pada masa pandemi covid-19 para pelaku UMKM pasti mengalami penurunan pada modal usaha untuk mengatasi masalah tersebut Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengambil kebijakan memberikan referensi kepada pihak UMKM dan berkoordinasi dengan pihak bank untuk dapat memberikan pinjaman kepada pelaku UMKM sehingga UMKM tetap dapat bertahan di masa pandemi.
- d. Pemberlakuan Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)

Program ini bertujuan untuk mendorong national branding produk lokal unggulan pada berbagai marketplace, sehingga menciptakan industri, kreasi dan inovasi baru serta pasar yang lebih besar. Program ini juga bertujuan untuk mendorong digitalisasi bagi UMKM offline. Program ini dapat mengatasi hambatan bagi pelaku UMKM yang belum produktif sehingga dapat berkembang ke UMKM produktif.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Program transformasi digital dalam mendorong pemasaran produk UMKM memberikan banyak dampak positif di berbagai lapisan masyarakat termasuk pelaku UMKM dan pemerintah Kabupaten Buleleng. Penulis menemukan temuan penting yakni pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng mau ikut berpartisipasi dalam program transformasi digital walaupun belum semua pelaku UMKM melakukannya.

Layaknya program lainnya, penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode kualitatif untuk membahas program UMKM di masa pandemi covid-19 layaknya temuan Rika Desi Ernawati, dkk. Dalam pelaksanaan program transformasi digital di Kabupaten Buleleng, penulis masih menemukan beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi tersebut diantaranya pengetahuan teknologi yang rendah bagi pelaku UMKM, kurangnya modal, serta sulitnya dalam mengurus perizinan UMKM. Penulis juga meneliti mengenai digitalisasi UMKM guna mampu bersaing dengan bisnis lainnya, layaknya penelitian yang dilakukan oleh Yusyida Munsu, dkk.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Program Transformasi Digital Dalam Mendorong Pemasaran Produk UMKM Kabupaten Buleleng Oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM menurut konsep Edward III sudah mengalami perubahan antar dimensi Implementasi didalamnya, walaupun beberapa indikator masih mengalami kekosongan yang mengganggu terhadap pelaksanaan implementasi Program Transformasi Digital. Adapun Faktor Penghambat dari pelaksanaan Implementasi Program transformasi digital dalam mendorong pemasaran produk UMKM di masa pandemi covid-19 yaitu : Pengetahuan teknologi masih rendah bagi UMKM Non Produktif; Minimnya modal usaha bagi pelaku UMKM di masa pandemic; dan Sulitnya perizinan bagi UMKM. Upaya Dinas Perdagangan, Perindustrian, UMKM dan Koperasi dalam mengatasi hambatan Implementasi Program transformasi digital dalam mendorong pemasaran produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada masa pandemi Covid-19 di kabupaten Buleleng antara lain : Memberi pelatihan kepada pelaku UMKM yang tidak aktif; Mempermudah perizinan; Pemberian referensi kepada UMKM ke Bank mengena prosedur pemberian pinjaman; dan Pemberlakuan Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan di Kabupaten Buleleng

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program transformasi digitalisasi demi mendukung para pelaku UMKM untuk tetap melanjutkan usahanya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, UMKM dan Koperasi beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk

melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Balitbang, A. (2021). Hasil Kajian Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Umkm Di Kabupaten Buleleng. Balitbang.Bulelengkab.Go.Id.

Widnyani, N. M., Astitiani, N. L. P. S., & Putri, B. C. L. (2021). Penerapan Transformasi Digital Pada Ukm Selama Pandemi Covid-19 Di Kota Denpasar. Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis, 6(1), 79–87.

<https://balitbang.bulelengkab.go.id/>. Kajian Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM di Kabupaten Buleleng. di akses tanggal 28 Agustus 2021

Lasswell, Harold. 2018. *The Structure and Function Of Communication in Society*, ed. Oleh Sedarmayanti Komunikasi Pemerintahan (Bandung: Pt. Refika Aditama)

Arikunto, Suharsimi. 2010. *prosedur penelittitan : suatu pendekatan praktik*, Cet. 13 (Jakarta: Rineka Cipta)

